



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB

TAHUN 2025-2029



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

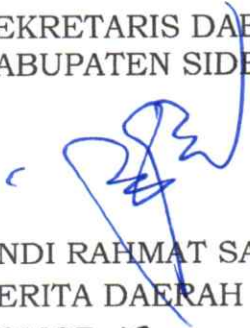
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta sebagai upaya untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi acuan strategis bagi seluruh jajaran Dinas PPKB dalam merancang program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari masukan dan partisipasi berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, mitra kerja, tenaga lapangan, akademisi, serta masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dinamika pembangunan dan kebijakan yang terus berkembang. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan visi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



SYAHRI MUBARAK, SKM, M.Amd.KP

Nip. 19810802 200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Kondisi Daerah	2
1.1.2 Gambaran Kondisi OPD	3
1.1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sidrap	3
1.1.4 Gambaran yang Mendasari Disusunnya Renstra	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1.3.1 Maksud	9
1.3.2 Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..	30
2.4. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
2.5. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	37
2.6. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
2.7. Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	44
3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026	44
3.1.1 Tujuan	44
3.1.2 Sasaran.....	44
3.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA PD	49
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja PD	49
4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah	99
4.3 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 Melalui IKU Perangkat Daerah.....	100
4.4 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	100
BAB V PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	22
2.2	Tabel Keadaan Barang (Sarana dan Prasarana) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.....	29
2.3	Tabel Telaahan Renstra K/L dan Renstra	37
2.4	Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	43
3.1	Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	45
3.2	Tabel Penahapan Resnsta PD	46
3.3	Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	47
3.4	Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	48
4.1	Tabel Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	50
4.2	Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	52
4.3	Tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	67
4.3	Tabel Indikator Kinerja Daerah Rancangan Awal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	98
4.4	Tabel Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Musreimbang Renstra	99
4.5	Tabel Indikator Kinerja Utama Musreimbang Renstra Pemerintah Kabupaten Sidrap	100
4.6	Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, serta program prioritas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029.

Pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga yang berkualitas, mendukung pembangunan sumber daya manusia, serta menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Melalui pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), Dinas PPKB berperan sebagai motor penggerak dalam menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga, pelayanan KB yang merata, edukasi remaja, pemberdayaan keluarga, dan pembentukan Kampung KB sebagai wahana integrasi lintas sektor.

Berbagai tantangan dan isu strategis masih dihadapi, seperti disparitas akses layanan KB, rendahnya partisipasi remaja dalam program PIK-R, angka kehamilan tidak diinginkan, serta masih terbatasnya pemanfaatan data keluarga secara optimal. Selain itu, dampak perubahan sosial dan demografi, digitalisasi pelayanan, serta dinamika ekonomi juga menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam pelaksanaan program.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran DPPKB dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.1.1 Kondisi Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar ±1.883,25 km² dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 300.000 jiwa. Secara administratif, wilayah ini terbagi dalam 11 kecamatan dan puluhan desa/kelurahan yang tersebar dalam wilayah agraris dan sebagian wilayah perbukitan. Letak geografis yang strategis serta keberagaman sosial budaya masyarakat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Dari aspek kependudukan, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti tingkat kelahiran yang tinggi di beberapa wilayah, angka kehamilan tidak diinginkan (KTD), serta persebaran pasangan usia subur (PUS) yang tidak merata. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya pernikahan usia dini, keterbatasan akses pelayanan KB di daerah terpencil, serta rendahnya partisipasi remaja dalam program pendidikan kependudukan.

Kondisi keluarga juga memerlukan perhatian khusus, khususnya dalam hal ketahanan dan kesejahteraan. Masih terdapat keluarga yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi, termasuk keluarga pra-sejahtera dan keluarga risiko tinggi terhadap stunting. Kualitas pembinaan kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R juga masih perlu ditingkatkan baik dari segi cakupan maupun efektivitas pendampingannya.

Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui penguatan sistem informasi keluarga berbasis teknologi (SIGA), pelibatan lintas sektor dalam pengembangan Kampung KB, serta potensi kolaborasi dengan pemerintah desa dalam mendukung program Bangga Kencana. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan juga memberikan kesempatan untuk memperluas akses dan efektivitas pelayanan KB serta penyuluhan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang perlu merumuskan strategi yang tepat, adaptif, dan inovatif dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan keluarga dan kependudukan yang berkelanjutan pada periode 2025–2029.

1.1.2 Gambaran Kondisi OPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPPKB telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas sekretariat, bidang-bidang teknis (misalnya: Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga), serta unit pelaksana teknis di kecamatan. Pelayanan di tingkat lini lapangan didukung oleh Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB (PLKB), serta kader-kader masyarakat seperti Kader BKB, BKR, BKL, dan UPPKA.

Secara kelembagaan, DPPKB telah mengintegrasikan pendekatan pembangunan berbasis keluarga melalui pemanfaatan data keluarga yang dihimpun melalui Pendataan Keluarga dan sistem informasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga). Pendekatan ini

mendukung perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) serta memungkinkan pemantauan intervensi terhadap keluarga sasaran, termasuk keluarga risiko stunting, keluarga prasejahtera, dan pasangan usia subur.

Dalam aspek pelayanan, Dinas PPKB telah melaksanakan berbagai program strategis seperti pelayanan KB gratis, pembentukan dan pengembangan Kampung KB, edukasi remaja melalui PIK-R, serta pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKA. Pelayanan KB telah menjangkau sebagian besar desa/kelurahan, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan masyarakat yang belum sepenuhnya teredukasi mengenai pentingnya pengaturan kehamilan dan pembangunan keluarga.

Dalam aspek sumber daya, dinas masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh KB di lapangan, keterbatasan anggaran operasional, serta kebutuhan peningkatan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan. Meski demikian, semangat kolaborasi dengan lintas sektor, peran aktif pemerintah desa, dan keterlibatan mitra swasta serta tokoh masyarakat menjadi potensi besar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan keluarga.

Secara umum, Dinas PPKB Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas cakupan layanan, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan keluarga berkualitas dalam lingkungan penduduk yang tumbuh seimbang sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

1.1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kab.Sidenreng Rappang Terkait Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi : Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera.

Misi : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul dan Kesehatan Untuk Semua.

1.1.4 Gambaran Mendasari Disusunnya Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026–2029 didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Renstra ini menjadi landasan utama dalam perencanaan program dan kegiatan selama lima tahun,

yang disusun secara sistematis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Beberapa faktor yang menjadi dasar disusunnya Renstra ini antara lain:

1. Amanat Regulasi

Renstra disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah, evaluasi Renstra, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Selain itu, penyusunan Renstra mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional melalui dokumen RKP, RPJMN, dan Rencana Strategis BKKBN.

2. Kondisi dan Tantangan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi berbagai tantangan kependudukan seperti angka kelahiran yang masih fluktuatif, kesenjangan pelayanan KB antarkecamatan, kasus pernikahan usia dini, serta potensi keluarga berisiko tinggi terhadap stunting dan kemiskinan. Diperlukan strategi yang responsif terhadap kondisi tersebut agar upaya pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga dapat lebih efektif dan merata.

3. Kinerja Capaian Sebelumnya

Evaluasi terhadap capaian program Bangga Kencana dalam periode sebelumnya menunjukkan perlunya peningkatan cakupan pelayanan KB, penguatan pendampingan keluarga, serta peningkatan kualitas SDM pelaksana program di lapangan. Beberapa target strategis masih belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan penyesuaian pendekatan intervensi.

4. Perkembangan Teknologi dan Data

Transformasi digital dan sistem informasi yang semakin berkembang, seperti SIGA (Sistem Informasi Keluarga) dan Pendataan Keluarga berbasis NIK, memberikan peluang besar untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan, serta mempermudah perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning).

5. Sinergi Lintas Sektor dan Kelembagaan

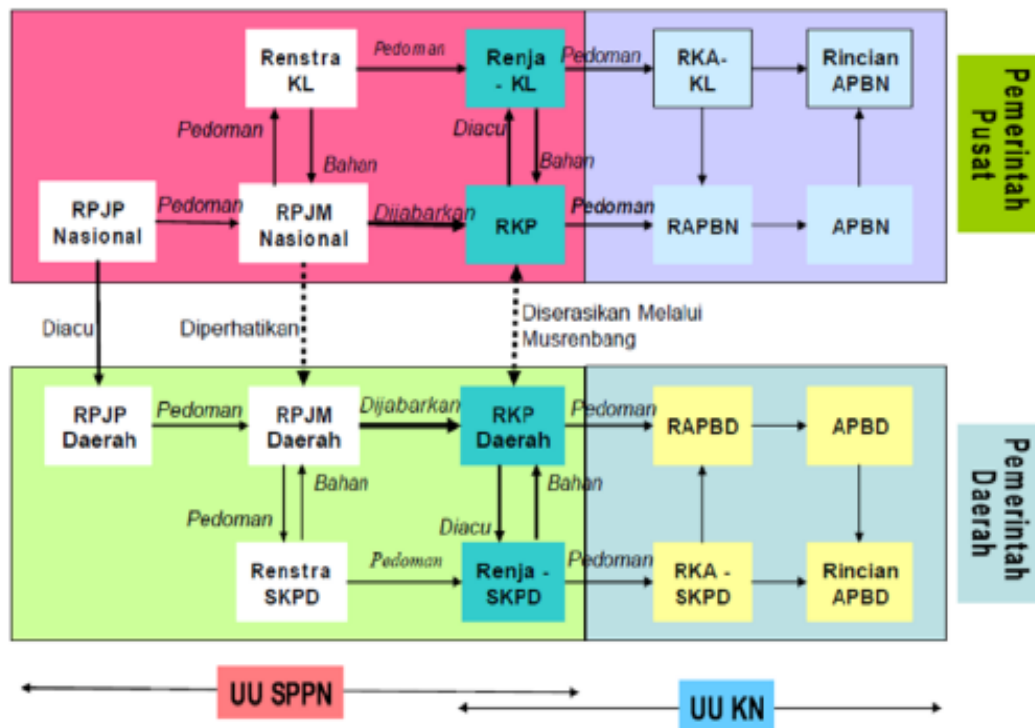
Kesuksesan pelaksanaan program Bangga Kencana sangat ditentukan oleh sinergi antara DPPKB dengan perangkat daerah lainnya, lembaga non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Renstra ini berperan sebagai dokumen arah kebijakan yang menguatkan koordinasi lintas sektor agar intervensi terhadap keluarga dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Renstra DPPKB 2025–2029 disusun untuk memberikan arah strategis pembangunan kependudukan dan

keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan orientasi pada pelayanan yang inklusif, adaptif, dan berbasis data.

Gambar 1:1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, Dan Dengan Renja Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 8 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 10 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun

2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);

46. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta dalam rangka Penyusunan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025- 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan perangkat daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara arah pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, khususnya dalam pelaksanaan program Bangga Kencana yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga dan penduduk.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara sistematis, terukur, dan terintegrasi.
2. Menjabarkan visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah dalam bentuk sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB.
3. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga.
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, pelaksanaan pelayanan KB, pendataan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di bidang kependudukan dan keluarga, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dibagi dalam delapan Bab, dari bab satu sampai dengan bab dua merupakan satu kesatuan substansi dari disusun rancangan renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagai bagian dari

Penjabaran rancangan awal RPD tahun 2025-2029 khususnya bidang pembangunan kesehatan masyarakat.

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dan jaringannya.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Telaahan Renstra Kementerian Kemendug Bangga/BKKBN dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Sidenreng Rappang. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis yang berkembang lima tahun kedepan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Strategi dan Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan yang harus dipedomani sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029. Strategi Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Sedangkan Kebijakan Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Memuat tentang Uraian Rencana Program dan Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2025-2029.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang uraian indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029.

BAB VIII. PENUTUP

Berisi informasi tentang uraian singkat tentang kesimpulan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pejabaran dari Rancangan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelayanan DPPKB diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pendekatan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

Layanan yang diberikan oleh DPPKB meliputi:

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB), baik melalui fasilitas kesehatan maupun pelayanan jemput bola.
2. Edukasi dan penyuluhan kelompok usia remaja, pasangan usia subur, dan keluarga binaan.
3. Pembinaan kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan kelompok UPPKA.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan data keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
5. Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan di Kampung KB sebagai pusat integrasi program lintas sektor.

Pelayanan dilaksanakan secara berjenjang hingga ke desa/kelurahan, didukung oleh penyuluh KB, petugas lapangan, dan kader masyarakat, serta bermitra dengan pemerintah desa, puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah dilengkapi dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya, tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pelayanan, masing-masing dapat diuraikan dibawah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dalam kedudukan di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Membantu kepala pemerintah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Sumber Daya Perangkat Daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, kb, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah
3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, KB ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4. penetapan rencana kerja dinas pengendalian penduduk dan KB menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kebawah
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
6. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana
7. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilingkungan kabupaten/kota termasuk dukungan dana, sarana dan pra sarana
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Uraian Tugas Masing-masing Jabatan antara lain Sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1.1 Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga;

- 1.2 Pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- 1.3 Pembinaan pelaksanaan Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- 1.4 Pembinaan pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk
- 1.5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekertaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan, pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

Adapun Fungsi Sekertasiat adalah sebagai berikut :

- 2.1 Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Dinas;
- 2.2 Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 2.3 Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 2.4 Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 2.5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Adapun Fungsi dari bagian perencanaan :

- 3.1 Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3.2 Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3.3 Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 3.4 Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 3.5 Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 3.6 Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 3.7 Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- 3.8 Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- 3.9 Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- 3.10 Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- 3.11 Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- 3.12 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang. Adapun Fungsi Bagian Keuangan adalah :

- 1.1 Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 1.2 Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 1.3 Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 1.4 Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 1.5 Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 1.6 Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 1.7 Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- 1.8 Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- 1.9 Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- 1.10 Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 1.11 Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 1.12 Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- 1.13 Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

- 1.14 Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- 1.15 Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- 1.16 Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 1.17 Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 1.18 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian Bertugas untuk Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang. Adapun Fungsi dari bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

- 5.1 Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5.2 Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 5.3 Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 5.4 Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5.5 Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5.6 Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5.7 Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- 5.8 Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 5.9 Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 5.10 Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- 5.11 Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- 5.12 Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- 5.13 Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- 5.14 Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- 5.15 Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 5.16 Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- 5.17 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- 5.18 Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 5.19 Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 5.20 Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- 5.21 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk Daerah. Bidang Pengendalian Penduduk memiliki fungsi sebagai berikut :

- 6.1 Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
- 6.2 Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk;
- 6.3 Penyelenggaraan norma standar, prosedur, dan kriteria Bidang Pengendalian Penduduk;
- 6.4 Penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 6.5 Penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten;
- 6.6 Penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- 6.7 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk;
- 6.8 Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana Daerah. Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 7.1 Pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 7.2 Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 7.3 Penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 7.4 Penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
- 7.5 Penyelenggaraan pelayanan keluarga Berencana Kabupaten;
- 7.6 Penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesertaan Ber-KB Daerah;
- 7.7 Penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 7.8 Penyelenggaraan pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
- 7.9 Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 7.10 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- 7.11 Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas susai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Sejahtera

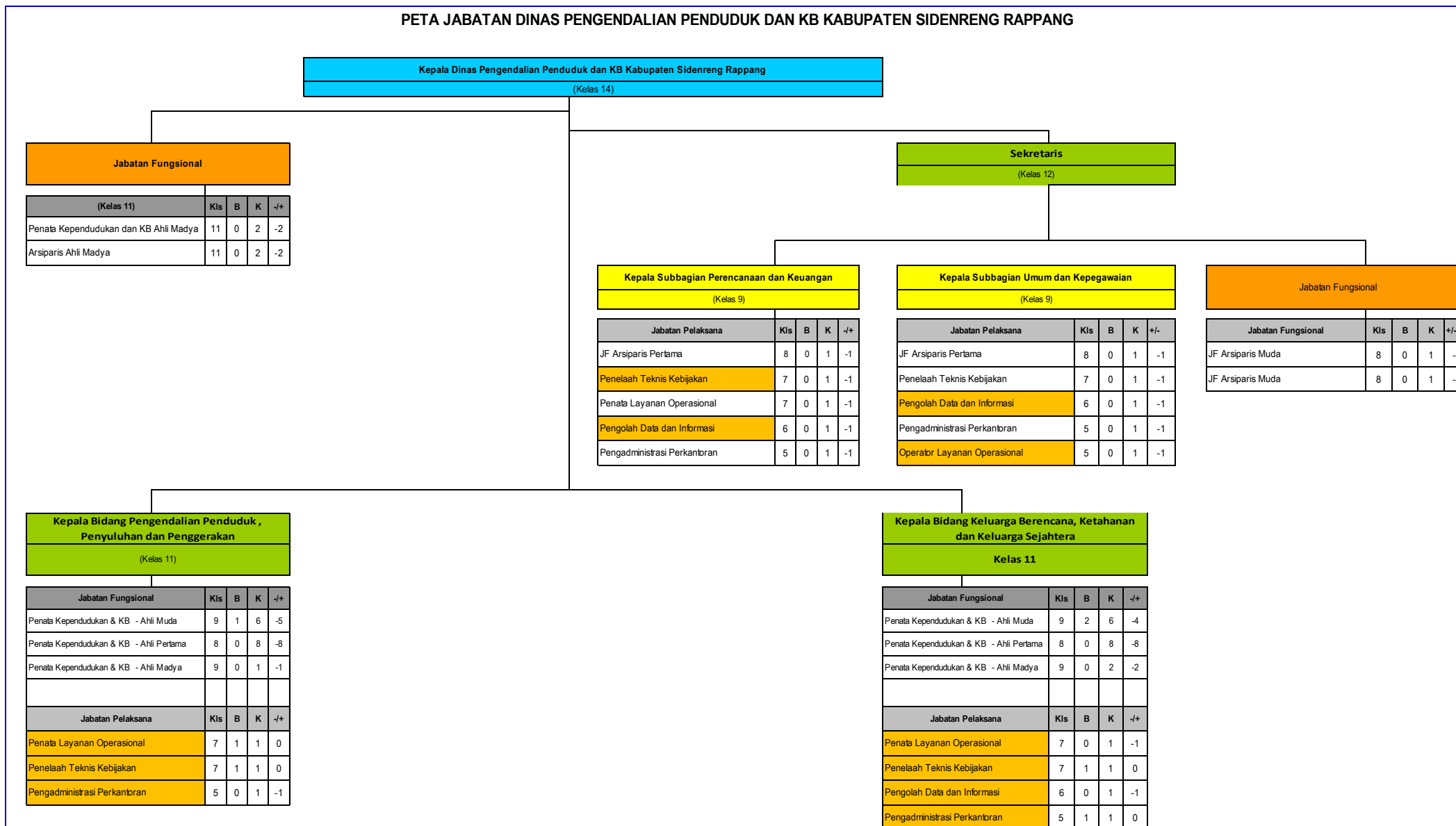
Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga tingkat daerah. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera memiliki fungsi:

- 7.1 Pengkoordinasian perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
- 7.2 Penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
- 7.3 Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
- 7.4 Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
- 7.5 Pengkoordinasian dan pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;

- 7.6 Penyelenggaraan Jambore kader Tribina (Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Bina Keluarga Remaja, UPPKS);
- 7.7 Pemberntukan Kelompok Ketahanan dan Keluarga Sejahtera (Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKS;
- 7.8 Pelaksanaan dan atau pemberian dukungan Survey Indeks Pembangunan Keluarga;
- 7.9 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
- 7.10 Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Sumber Daya Barang (Sarana dan Prasarana)
- c. Sumber Daya Kelembagaan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM);

Jumlah SDM Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sidenreng Rappang Sebanyak 85 orang yang terdiri atas Seorang Pemimpin, Seorang Sekertaris, 2 Kepala Sub Bagian, 2 Kepala Bidang dengan 4 Seksi , 5 Kepala UPT, Selebihnya Sebagai Staf dan Kepala Fungsional Pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOL RUANG	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Syahrul Mubarak, S.KM.,M.Adm.KP 19810802 200604 1 015	S2 Administrasi	Pembina, IV/a	Kepala Dinas	14	
2				Sekretaris	12	
3				Kasubag Umum dan Kepegawaian	9	
4				Kasubag Keuangan dan Perencanaan	9	
5				Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	
6				Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan	11	

7	Henny Wahyuni, SKM 19820618 200502 2 002	S1 Kesehatan Masyarakat	Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	7	
8	Hj. Mariati R, SKM 19680605 198903 2 012	S1 Kesehatan Masyarakat	Penata Tk.I, III/d	JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	
9	Hj. Darniyati, S.Pd., M.Si 19721010 200701 2 018	S2 Sains	Penata Tk.I, III/d	JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	
10	Hidayatun Nafi'ah Anwar, SKM 19840204 201001 2 021	S1 Kesehatan Masyarakat	Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	7	
11	Tajuddin, S.Sos 19750601 200101 1 025	S1 Ilmu Sosial	Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	7	
12	Arafa, SE 19690831 200112 2 001	S1 Ekonomi	Penata Tk.I, III/d	JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	
13	Ika Srimachyuniyati B. 19840920 201407 2 001	SMA	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perkantoran	5	
14	Muhammad Agussalim, S.Pd 19670829 198903 1 007	S1 Pendidikan	Penata Tk.I, III/d	Kepala UPT Wilayah I	9	
15	Hj. Kasmawati, SKM.,M.Adm.,KP 19810211 200212 2 002	S2 Administrasi	Pembina, IV/a	KTU UPT Wilayah I	9	

16	Hj. Rusiana, S.Sos.,MM 19680704 198903 2 008	S2 Manajemen	Penata Tk.I, III/d	Kepala UPT Wilayah II	9	
17	Yusdanar, S.Kep 19850521 200502 1 001	S1 Keperawatan	Penata, III/c	KTU UPT Wilayah II	8	
18	Gusriyani, S.Sos.,MM 19780722 200801 2 014	S2 Manajemen	Penata Tk.I, III/d	Kepala UPT Wilayah III	9	
19	Jufriadi, S.ST,M.Kes 19780211 200502 1 002	S2 Kesehatan	Penata Tk.I, III/d	KTU UPT Wilayah III	8	
20	Dra. Hj. Masjuni 19671231 199202 2 045	S1	Pembina, IV/a	Kepala UPT Wilayah IV	9	
21	Jumliyani, SKM 19801212 201001 2 023	S1 Kesehatan Masyarakat	Penata Tk.I, III/d	KTU UPT Wilayah IV	8	
22	Anshar, S.Sos 19681007 199003 1 006	S1 Ilmu Sosial	Penata Tk.I, III/d	Kepala UPT Wilayah V	9	
23	Wahidah Nur 19691231 199103 2 031	SMA	Penata Tk.I, III/d	Pengadministrasi Perkantoran	5	

No	NIP Baru	Nama Lengkap	Jabatan Akhir	Pangkat Akhir	Golongan Akhir	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	196701291991032006	HJ. DERIANA, SE	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk. I	IV/b	57	Perempuan	S1
2	196703231988032013	HJ. FATMAWATI, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk. I	IV/b	57	Perempuan	S1
3	196704011990032006	HERNIATI SIGALA, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk. I	IV/b	57	Perempuan	S1
4	196807261989032006	MANTASIA, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina	IV/a	56	Perempuan	S1
5	196807301993031006	MUHAMMAD AKRAB ARIEF, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk. I	III/d	56	Laki-Laki	S1
6	196906211990032006	HJ. NUR JAYA, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk. I	IV/b	55	Perempuan	S1
7	196908081991032013	HJ. ANDI ATIRA, S.Pd	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	Pembina Tk. 1	IV/b	55	Perempuan	S1
8	197102012014121001	ABBAS	Penyuluh Keluarga Berencana Pemula	Pengatur Muda	II/a	53	Laki-Laki	SLTA
9	197503282010011006	HAMZAH ISMAIL, S.Ag	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata. Tk.I	III/d	49	Laki-Laki	S1
10	197605022014072001	ERNAWATI DARWIS, A.md.Pi	Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana	Pengatur	II/d	48	Perempuan	DIII
11	197611292002122005	MASLIMA, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk. I	III/d	48	Perempuan	S1
12	197708172010011018	NUSRUDDIN BIN UDDIN, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I	III/b	47	Laki-Laki	S1
13	197711152007012012	SYAMSIAH, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I	III/b	47	Perempuan	S1
14	197809102010011030	KUSNADI KADIR, SE	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I	III/b	46	Laki-Laki	S1
15	198005242011011002	BANI SADER, S.Sos	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Penata Muda	III/a	44	Laki-Laki	S1
16	198010072008042002	WENNY OKTORA, S.IP.	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk. I	III/d	44	Perempuan	S1
17	198311272010011004	ASRUL ANSARUNA, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana	Penata Muda Tk. I	III/b	41	Laki-Laki	S1

			Ahli Pertama					
18	198404192009011001	MUHAMMAD IDRIS AZIS, S.Pd	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I	III/b	40	Laki-Laki	S1
19	198504272006042006	SRIWAHYUNA ZULKIFLI, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tk. I	III/d	39	Perempuan	S1
20	198505232010011014	ANDI ADI NEGARA, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata. Tk.I	III/d	39	Laki-Laki	S1
21	198611282015031004	FAIDUL RAHMAN THAHIR, S.H.I	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	38	Laki-Laki	S1
22	198702092009042001	HASLINDA LATIF, S.IP	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata. Tk.I	III/d	37	Perempuan	S1
23	198708012019021002	HARDI HAMRI, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	37	Laki-Laki	S1
24	197707272022212009	SALMA AKIB, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	47	Perempuan	S1
25	197904252022212002	MASITA, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	45	Perempuan	S1
26	198303052022212003	Hj. HASMIATI JUDDA, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	41	Perempuan	S1
27	198308012022212003	ROSMIATI, S.P	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	41	Perempuan	S1
28	198708182022211005	SAID, SE	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	37	Laki-Laki	S1
29	198802212022212004	JUSNAEDAR S, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	36	Perempuan	S1
30	199006252022211005	SARIFIN, SE	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	34	Laki-Laki	S1
31	199011172022212004	SINTA DEWI, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	34	Perempuan	S1
32	199012012022212001	FARADIBA HASAN, S.Sos	Penyuluh Keluarga Berencana		IX	34	Perempuan	S1

			Ahli Pertama					
33	199404202022212010	NADIRAH, S.AP	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	30	Perempuan	S1
34	199411162022212002	SURAIIDA, S.E	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	30	Perempuan	S1
35	199501142022211002	MAHMUD, SE	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	29	Laki-Laki	S1
36	197811232023211010	KAMRULLAH, SE	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	46	Laki-Laki	S1
37	198108232023212025	ANDI SORAYA, S.Ksi	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	43	Perempuan	S1
38	198704032023212039	ASRINI MATTRAH, SKM	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	37	Perempuan	S1
39	198608032023212031	NURJANI PAHMAL, S.E	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	38	Perempuan	S1
40	199207252023212043	ANDI ANITA ARIANI MURPA PALAGUNA, S.Pt	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	32	Perempuan	S1
41	199909212023212003	RANA MUTHI'AH DINAYAH, S.Pd	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	25	Perempuan	S1
42	199707132023212024	NURUL MUHLISAH, S.Pd	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	27	Perempuan	S1
43	199609042023212021	SITTI RAHMAH, S.Pd	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama		IX	28	Perempuan	S1
44	198906142023212057	SRI FATIMA ULFA, A.Md.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	35	Perempuan	DIII
45	199002022023212049	JUMRIA, A.Md.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	34	Perempuan	DIII
46	199008132023212044	NURUL ULMI LATIF, A.Md.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	34	Perempuan	DIII
47	199204212023212045	IRA NOVIANTI IRWAN, Amd.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	32	Perempuan	DIII

48	199210062023212030	SARTIKA ALI, Amd.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	32	Perempuan	DIII
49	199310052023212052	ADE IRMA KASTURI, A.Md.Kep	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	31	Perempuan	DIII
50	199310082023212041	JUMRIANI, Amd.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	31	Perempuan	DIII
51	199508172023212056	MARIANA, A.Md.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	29	Perempuan	DIII
52	199512132023212024	RIA RESKY, A.Md.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	29	Perempuan	DIII
53	199803042023211004	RAVICH AMRULLAH, A.Md.Farm	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	26	Laki-Laki	DIII
54	199803242023212006	EKA NIRWANA A, A.Md.Keb	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	26	Perempuan	DIII
55	199901292023212002	KHAIRIAH AKKAS, A.Md.Farm	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	25	Perempuan	DIII
56	200007262023212001	A. TENRIOLA PAWENCENGI, A.Md.Kes	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		VII	24	Perempuan	DIII
57	199812102024212007	REZKI NURMADANA	Penyuluh Keluarga Berencana Pemula		V	26	Perempuan	SMA
58	199901012024212001	JUMARNI	Penyuluh Keluarga Berencana Pemula		V	25	Perempuan	SMA
59	199912052024211002	M. RIZAL	Penyuluh Keluarga Berencana Pemula		V	25	Laki-Laki	SMA
60	200304172024211001	WARAKATI	Penyuluh Keluarga Berencana Pemula		V	21	Laki-Laki	SMA

b. Sumber Daya Barang (Sarana dan Prasarana)

Tabel 2.2 Keadaan Barang (Sarana dan Prasarana) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Nama Unit Layanan	Kondisi Roda 4 / Mobil Dinas	Gedung Kantor	Komputer (Unit)	Kendaraan Roda Dua
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (Kabupaten)	4	1	9	17
Balai Maritengngae	-	1	3	7
Balai Watang Pulu	-	1	4	5
Balai Watang Sidenreng	-	1	3	3
Balai Baranti	-	1	2	5
Balai Kulo	-	1	3	3
Balai Dua Pitue	-	1	3	4
Balai Panca Rijang	-	1	4	7
Balai Pitu Riawa	-	1	4	7
Balai Pitu Riase	-	1	2	4
Balai Tellu Limpoe	-	1	2	5
Balai Panca Lautang	-	1	4	4
Total	4	12	43	71

Sumber : Bagian Data dan Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

c. Sumber Daya Kelembagaan.

Sumber daya Kelembagaan Dinas Penduduk dan KB Sebagaimana di Jelaskan pada tugas dan fungsi seta Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sidenreng Rappang pada Bab II ini adalah :

1. Kelembagaan Induk Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang Terdiri dari Unit Pimpinan, Sekertariat dengan 2 sub Bagian dan 2 Bidang dengan 4 Seksi.
2. Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Operasional, Sebagai Unit dengan Tugas dan Fungsinya bersifat operasional fungsional Pengendalian Penduduk dan KB yang memiliki jaringan kerja berupa Balai di setiap Kecamatan. Balai dan Jejaringnya Memiliki wilayah kerja dalam Lingkup Kecamatan. Ada 11 (sebelas) Balai KB :
 - 1) Balai KB Kec. Maritengngae
 - 2) Balai KB Kec. Watang Pulu
 - 3) Balai KB Kec. Watang Sidenreng
 - 4) Balai KB Kec. Baranti
 - 5) Balai KB Kec. Kulo
 - 6) Bakai KB Kec. Dua Pitue
 - 7) Balai KB Kec. Panca Rijang
 - 8) Balai KB Kec. Pitu Riase
 - 9) Balai KB Kec. Pitu Riawa
 - 10) Balai KaB Kec. Tellu Limpoe
 - 11) Balai KB Kec. Panca Lautang

2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Permasalahan Internal

a. Masih Kurang Efektifnya Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Pengendalian penduduk merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah sangat menentukan pembanguna. Salah satu kebijakan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah dengan melakukan program Keluarga Berencana. Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai kabupaten di Indonesia memiliki masalah kependudukan. Padatnya penduduk mengakibatkan timbulnya pemukiman kumuh. Jumlah penduduk yang padat tersebut menimbulkan kegerahan di kalangan legislatif mengenai kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB sebagai lembaga pemerintah yang menangani langsung masalah pelayanan kesehatan, KB dan pertumbuhan penduduk.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peranan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kegiatan KB, melakukan konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi serta penanggulangan paska pemasangan alat kontrasepsi, dan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebesar 1,25 % Hambatan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk yaitu kurangnya tenaga teknis yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur budaya masyarakat setempat dan tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi hambatan tenaga penyuluh KB di kecatamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Masih Kurangnya Perangkat Daerah Yang Berperan Aktif Dalam Program Kampung KB

Kampung KB merupakan program dalam mengatasi masalah kependudukan dan hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu Nawacita yang di dengungkan oleh Presiden Jokowi dimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia

Kurangnya kepedulian perangkat daerah dan masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat penyumbang angka kepadatan penduduk dan bisa berdampak pada kemiskinan, keterbelakangan dan kesehatan yang rendah. Kemudian kurang terbinanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat salah satu penyebab belum menurunnya angka kepadatan penduduk. Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Tetapi pelaksanaan kampung KB di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB, sehingga Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah baru 37,5 % pada tahun 2019.

Padahal Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB.

c. Masih Kurangnya Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan induk pengendalian penduduk ini sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan laju pergerakan pembangunan. Rancangan induk pengendalian penduduk diharapkan bisa menjadi acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah

Perangkat daerah yang memanfaatkan Rancangan induk pengendalian penduduk berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 37,5% persen pada tahun 2019, Selanjutnya koordinasi dari seluruh mitra kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB sangat dibutuhkan agar masalah kependudukan ini juga menjadi fokus perhatian yang harus ditangani bersama-sama.

Rancangan induk ini diharapkan bisa menjadi acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah dan bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah terutama dalam pengaturan kelahiran agar jumlah anak dalam satu keluarga tidak terlalu besar. Indikator ini digunakan dengan menggunakan rumus formula jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan pengendalian penduduk dibagi dengan jumlah

d. Masih Tingginya Capaian Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga.

Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk usia 0-18 tahun. Rata-rata jumlah anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2016 adalah 142 2,54 anak per keluarga. Angka ini mengalami penurunan sedikit demi sedikit dari sejak awal periode (2019) yang saat itu sebesar 2.28 anak per keluarga. Pemerintah, secara nasional menyarankan agar jumlah anak adalah 2 anak per keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, kondisi di Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang belum sesuai dengan anjuran.

e. Masih Rendahnya Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut.

f. Masih Tingginya Angka Melahirkan Di Usia Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)

Kehamilan dan komplikasi persalinan merupakan penyebab kematian remaja yang berusia antara 15 – 19 tahun. Cara aborsi tidak aman yang berlangsung setiap tahun di kalangan remaja berusia 15 – 19 tahun menjadi salah satu faktor penyebab kematian ibu dan masalah kesehatan yang berterusan. Hamil pada usia muda meningkatkan risiko pada ibu dan anaknya. Bayi yang lahir pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun mempunyai 50% risiko lebih tinggi untuk mati dalam beberapa minggu pertama dari bayi yang lahir pada ibu yang berumur lebih dari 20 tahun. Bayi yang lahir pada ibu remaja lebih cenderung mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) dengan risiko efek jangka panjang.

g. Masih Tingginya Risiko Ibu Melahirkan Usia Dibawah 20 Tahun.

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 - 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20- 35 tahun, dan usia diatas 35 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari program Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasan usia kawin pertama.

h. Masih Rendahnya Tingkat Kelangsungan Pemakaian Kontrasepsi.

Persentase ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi (contraceptive discontinuation rate) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (exposure) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian drop out KB.

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di kabupaten sidenreng Rappang pada tahun 2019 adalah sebesar 25,5% dan faktor-faktor yang menyebabkan PUS tidak menjadi peserta KB jangka panjang adalah pelayanan KB yang masih kurang berkualitas, keterbatasan alat kontrasepsi, penyampaian konseling maupun KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) belum dilaksanakan dengan baik, hambatan budaya, kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (unmet need), dan kelompok hard core yaitu kelompok wanita yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

i. Kurangnya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga. PPKS berada di lingkup kecamatan seperti halnya puskesmas. Persentase PPKS dapat digunakan untuk melihat cakupan PPKS di suatu wilayah.

j. Masih Kurangnya Ketersediaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja

Adanya PIK-R/M pada ruang lingkup remaja memiliki peran yang sangat penting, artinya untuk membantu remaja memperoleh informasi dan layanan konsultasi yang memadai dan benar tentang mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja, ada beberapa masalah yang ada dalam pengelolaan PIK-R/M untuk menjadikan masyarakat berwawasan kependudukan ialah kurang intensifnya pendampingan dari tenaga terkait, kurangnya sosialisasi tentang dokumen PIK-R, masyarakat kurang mendukung, regenerasi yang sulit, belum berjalanya pelayanan KIE tentang kesehatan reproduksi disebabkan keterbatasan personil dan sarana prasarana.

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa di kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2019 baru mencapai 4,39%. Suatu hasil capaian yang masih jauh dari target yakni 100%.

k. Masih Rendahnya Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PKB (penyuluh keluarga berencana) dan PLKB (petugas lapangan KB) pada awalnya adalah aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kabupaten/kota, namun terjadi 145 pengalihan status menjadi ASN pemerintah pusat. Pengalihan status PKB/PLKB ini merupakan konsekwensi pelaksanaan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski telah beralihkelola ke pemerintah pusat, PKB/PLKB akan tetap bertugas di daerah, karena fungsi pendayagunaan PKB/PLKB tetap ada pada pemerintah kabupaten/kota

l. Belum Optimalnya Sistem Sinkronisasi Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Sudah Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Dengan SIM KBKR dalam Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres no.19 tahun 2016 bahwa peserta BPJS saat ini dapat menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini merupakan kerjasama BPJS dengan faskes dan jejaringnya untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Berdasarkan tabel di bawah ini, di Kabupaten Sidenreng Rappang ada 14 jumlah faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2015 (69,58%) hingga 2019 (72,35%),

m. Rendahnya Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, KB Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Selama kurun waktu 2 tahun dari 2018 hingga 2019, persentase pembiayaan program kependudukan KB dan Pembangunan keluarga melalui APBD tahun 2018 mencapai Rp.182.000.000 dan pada tahun 2019 mencapai Rp.766.590.500.

n. Masih Rendahnya Proporsi Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait 146 Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, Dan Layanan Kesehatan Reproduksi (SDGs)

Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi yaitu saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang dialami sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah yang mendasar yang menyebabkan buruknya kesehatan perempuan saat hamil, bersalin, dan masa nifas.

Tingkat pendidikan, kualitas dan kuantitas makanan, nilai dan sikap, sistem kesehatan yang tersedia dan bisa diakses, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya.

2. Permasalahan Eksternal

- 1) Struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya;
 - a. angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah;
 - b. kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
 - c. belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
 - d. masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan; dan
 - e. masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana
- 2) Pembangunan keluarga dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain masih tingginya jumlah keluarga miskin, Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah, Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah.
- 3) Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi

kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

2.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA

Maju bermakna : Merujuk pada upaya untuk memajukan pembangunan daerah melalui berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Sidenreng Rappang baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Misi :

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif.
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan Pendidikan unggul dan Kesehatan untuk semua.
4. Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, Berbudaya, Beradat, dan Religius.
6. Mengingatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif melalui pemamfaatan teknologi informasi digital.
7. Mengembangkan Infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

2.5 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,13 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,06 pada 2024.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,13 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,06 pada 2024.	
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,82 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 56,28 persen pada tahun 2024	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,82 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 56,28 persen pada tahun 2024.	
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,86 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,17 persen pada 2024	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,86 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,17 persen pada 2024	
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun,	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 40 per 1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 29 per 1.000 kelahiran pada 2024.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 40 per 1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 29 per 1.000 kelahiran pada 2024.	
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 56,69 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 64,55 pada tahun 2024	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 56,69 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 64,55 pada tahun 2024	
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.	

2.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Faktor Penghambat Pengembangan Pelayanan

1.1 Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mengetahui dan terlibat aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selama ini DPPKB Kab. SIDRAP belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sebagai media informasi yang dapat diakses masyarakat menyangkut kebijakan, program kegiatan maupun data kependudukan termasuk sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun pengaduan.

1.2 Rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemakaian Alat Kontrasepsi KB.

Adanya sebagian kebijakan pemerintah yang belum didukung secara penuh oleh masyarakat, menjadi tantangan bagi DPPKB Kab. SIDRAP untuk mendorong terbitnya regulasi yang mengatur tentang kebijakan tersebut.

1.3 Kapasitas kelembagaan baik lintas OPD maupun lintas sektor

Keberadaan Kelembagaan yang akan membantu tercapainya penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik lintas sektor maupun lintas OPD belum dibarengi dengan kapasitas yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan tingkat capaian kinerja organisasi.

1.4 Perubahan Regulasi

Peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN PASTI) tahun 2021 - 2024 menjadi tantangan untuk DPPKB dalam pelaksanaan program tersebut melalui pendekatan keluarga yang harus dikolaborasikan dengan program Bangga Kencana.

1.5 Tren Sex bebas

Dengan adanya sex bebas yang semakin meningkat di kalangan remaja dikhawatirkan menjadi polemik yang sudah trend dan biasa dilakukan dikalangan muda mudi dan ini menjadi tantangan DPPKB Kab. SIDRAP dalam mengoptimalkan penurunan sex bebas dengan adanya pembinaan pembinaan di kalangan remaja tentang bahaya sex bebas.

Selain itu angka kelahiran pada usia remaja masih tinggi, sehingga perlu ada inovasi untuk mensosialisasikan Kesehatan reproduksi kepada remaja. Melalui inovasi Wajah Kamu Bikin Gemes (Warga SIDRAP Cegah Kawin Muda Biang

Miskin dan Minim Prestasi) di harapkan ada peran semua masyarakat mampu mensosialisaikan pentingnya kesehatan reproduksi terhadap remaja.

1.6 Adanya resiko pasca pelayanan (komplikasi dan kegagalan)

Dengan adanya pelayanan KB di semua lini tingkatan diharapkan dapat menekan komplikasi dan kegagalan yang sedikit terjadi dan diharapkan segala bentuk komplikasi dan kegagalan dapat terlayani secara maksimal.

1.7 Ego Program

Ketidakpastian politik yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat maupun tuntutan pendidikan, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagaimana telah diketahui bahwa saat ini perencanaan dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan, oleh karenanya ketersediaan data yang mutakhir, valid, akurat sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan perencanaan dituntut membuat proyeksi berbasis informasi berkaitan dengan langkah-langkah yang akan ditempuh dimasa depan.

Dengan kondisi ini diharapkan ego program dapat teratasi dan dapat di kendalikan secara berkesinambungan dikarenakan kalau ini terjadi dapat terjadi miss komunikasi antar lintas program, dan untuk meminimalisir kearah itu, maka diadakan pembinaan aparatur yang solid.

2. Faktor Pendorong Pengembangan Pelayanan DPPKB

2.1 Komitmen BKKBN Pusat

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, salah satu fokus kebijakan Bangga Kencana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Revitalisasi Program Bangga Kencana yang diprioritaskan pada pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, pembinaan dan peningkatan kemandirian KB, Promosi dan penggerakan masyarakat dan Sistem informasi manajemen (SIM) guna mendukung berbagai prioritas kegiatan RKPD tersebut diatas perlu diatur oleh kebijakan antara pemerintah daerah dengan komitmen BKKBN Pusat.

Terbitnya Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN PASTI) tahun 2021-2024, menjadi peluang untuk DPPKB Kab. SIDRAP dalam melaksanakan pendampingan keluarga, sebagai wujud dari pencegahan terjadinya stunting baru.

2.2 Tersedianya Kader di Lapangan

Keberadaan Kader dilapangan merupakan peluang DPPKB dalam mempercepat dan Mengoptimalkan Target kinerja yang akan dicapai sesuai dengan indikator sasaran dan tujuan Pemerintah Kota yang menjadi kewenangan urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga akan tercipta pelayanan di berbagai bidang yang optimal dan pencapaian kinerja dapat tercapai secara maksimal dan akuntabel. Selain itu keberadaan kader KB dilapangan juga menjadi perpanjangan tangan dinas dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat .

2.3 Tempat pelayanan KB Swasta dan PPKS.

Peluang DPPKB Kab. SIDRAP semakin besar dengan adanya berbagai tempat pelayanan KB khususnya jalur swasta dan PPKS yang strategis dan nyaman bagi masyarakat, dimana merupakan institusi khusus dalam melayani masyarakat secara sustainable (berkelanjutan).

2.4 Adanya jejaring dengan Mitra Kerja

Adanya jejaring mitra kerja dengan instansi lain atau lintas sektoral lainnya akan menjadikan peluang yang strategis, karena dengan adanya komunikasi dengan instansi atau lintas sektoral lainnya diharapkan pencapaian kebijakan akan tercapai secara maksimal.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ke depan, melalui percepatan penanganan permasalahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta penerapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, diantaranya adalah :

1. Memperbaiki Komitmen Program;
2. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi secara efektif;
3. Adanya kolaborasi dengan instansi lain, sehingga terwujud pola pembangunan yang terintegrasi;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan KB dan Pemberdayaan peran serta gender.
5. Peningkatan pemahaman tentang kesadaran akan pentingnya pelayanan KB dan Pelayanan kesehatan reproduksi yang aktif, efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundang undangan melalui sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
6. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah dan perubahan regulasi yang terus berubah-ubah.

2.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bonus demografi pada tahun 2045 menjadikan pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, secara umum dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kesehatan yang ditopang oleh keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Terdapat beberapa aspek yang diukur untuk mengukur Indeks Kesehatan, salah satunya adalah melalui meningkatnya kualitas penduduk yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR).

Dalam hal pengendalian angka kelahiran, perlu meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana dan juga meningkatkan kesertaan ber-KB. Sehingga setiap individu ataupun pasangan seharusnya memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan reproduksi, dan layanan KB untuk perencanaan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal. Maka diperlukan adanya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta pemetaan pengendalian penduduk di daerah. Guna mendukung peningkatan kesertaan masyarakat dalam program Bangga Kencana.

Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik menjadi salah satu cara yang tepat di era digitalisasi saat ini untuk menyoal Pasangan Usia muda PUS Milenial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap Kesehatan reproduksi. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga dan diharapkan akan meningkatkan usia kawin pertama.

TFR yang masih naik turun belum memperlihatkan pertumbuhan yang ideal. Terkait dengan isu kualitas sumber daya manusia, hal yang paling menjadi ancaman adalah adanya anak stunting. Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Prevalansi stunting berada di bawah angka nasional. Namun demikian menjadi sebuah ancaman yang harus selalu diwaspadai. Karena akan melahirkan generasi yang minim prestasi dan juga daya saing rendah.

Oleh sebab itu pemerintah Kab. SIDRAP harus terus memberikan perhatian serius terhadap isu stunting ini agar anak – anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Salah satu yang perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1000 HPK) serta peningkatan pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN PASTI) tahun 2021-2024, telah menjadikan BKKBN sebagai penanggung jawab pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. Oleh sebab itu sebagai Dinas yang memiliki kewenangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana maka DPPKB memiliki peran penting dalam pencegahan penambahan angka Stunting baru. Pendekatan yang dilakukan oleh DPPKB adalah melalui upaya preventif yaitu dengan intervensi gizi sensitive. Hal yang diupayakan adalah melakukan pendampingan terhadap keluarga – keluarga resiko stunting.

Program dan kegiatan pada DPPKB diharapkan memberikan kontribusi yang nyata, dengan peningkatan kesertaan ber-KB kesehatan reproduksi dan juga adanya pendampingan untuk remaja siap nikah atau calon pengantin, ibu hamil dan juga ibu melahirkan. Disamping itu, Program Bangga Kencana secara keseluruhan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia secara umum dan juga kualitas Kesehatan.

Berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural, terdapat beberapa isu strategis yang berkenaan dengan DPPKB Kota Banjar yang memiliki kewenangan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu sebagai berikut :

1. Angka Total Fertility Rate (TFR) yang belum stabil
Pengendalian Angka Kelahiran Total (TFR) menjadi salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan. Hal ini berdampak pada angka laju pertumbuhan penduduk alami.
2. Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) masih di dominasi oleh pemakaian alat kontrsepsi Non MKJP;
3. Optimalisasi kualitas pokja kampung KB dan peran lintas sektor di semua kampung KB;

4. Kualitas data pelaporan yang belum optimal;
5. Jumlah penduduk usia remaja yang tinggi dengan tingkat kesadaran terhadap kesehatan reproduksi yang rendah;
6. Pola asuh dan tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (BALITA) belum optimal;
7. Optimalisasi peran PIk-R dan GenRe untuk mensosialisasikan inovasi Wajah Kamu Bikin Gemes (Warga Banjar Cegah Kawin Muda Biang Miskin dan Generasi Minim Prestasi);
8. Pemberdayaan dan pembinaan kesehatan penduduk lanjut usia (LANSIA);
9. Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan yang berdampak pada lingkungan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Ketersediaan tenaga penyuluh KB dan kader di tingkat desa/kelurahan	Sebaran tenaga penyuluh tidak merata	Perkawinan usia anak tinggi	Isu bonus demografi global	Arah kebijakan RPJMN 2025–2029 tentang keluarga berkualitas	Tingginya angka kemiskinan di beberapa kecamatan	Pemerataan tenaga penyuluh dan peningkatan kompetensinya
Kelembagaan Kampung KB aktif di beberapa wilayah	Masih rendahnya cakupan layanan KB di daerah terpencil	Akses pelayanan kesehatan reproduksi belum merata	Urbanisasi dan mobilitas penduduk	Kebijakan percepatan penurunan stunting nasional	Perkawinan usia anak di atas rata-rata provinsi	Peningkatan akses layanan KB yang berkualitas dan inklusif
Dukungan program nasional BKKBN	Kurangnya keterlibatan pria dalam program KB	Kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan keluarga	Perubahan nilai dan struktur keluarga	Transformasi digital pelayanan KB	Rendahnya partisipasi kelompok UPPKA	Peningkatan partisipasi pria dalam program KB
Basis data keluarga melalui SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Pemanfaatan data belum maksimal dalam perencanaan	Tingkat partisipasi pendidikan perempuan rendah	Krisis lingkungan berdampak pada kesehatan keluarga	Peningkatan peran laki-laki dalam KB	Ketersediaan layanan kesehatan belum merata	Optimalisasi pemanfaatan data keluarga berbasis SIGA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang. Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang, berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan OPD:
Terwujudnya Keluarga Sejahtera
2. Tujuan RPJMD :
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif

3.1.2 Sasaran

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran OPD :
Menurunnya Angka Kelahiran Total
2. Sasaran RPJMD :
Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Inklusif

**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN, DAN SAASARAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
- Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Inklusif	Terwujudnya Keluarga Sejahtera		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	60,04	61,04	62,04	63,04	64,04	65,04	66,04	
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,07	2,07	2,07	2,08	2,09	2,10	2,10	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip (poin)	55,70	58,20	61,40	64,16	66,21	68,04	70,16	

Penahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan. Perangkat Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Konsolidasi data keluarga berbasis NIK	Perluasan pembinaan UPPKA dan ketahanan keluarga	Integrasi sistem data dengan Dinkes & Dukcapil	Perluasan PIK-R dan BKR aktif di tiap kecamatan	Pemantapan kemandirian dan ketahanan keluarga
Penguatan kapasitas SDM (Penyuluh KB, Kader)	Pemanfaatan data SIGA untuk program lintas sektor	Digitalisasi layanan KB dan pendampingan keluarga	Peningkatan jejaring kerja dengan pemerintah desa	Inovasi layanan KB digital dan mobile
Penguatan Kampung KB sebagai pusat layanan terpadu	Pendekatan edukatif di sekolah & komunitas remaja	Penguatan monitoring keluarga berisiko stunting	Pembinaan intensif keluarga rawan	Penajaman intervensi berbasis data mikro
Pendataan ulang keluarga melalui SIGA	Peningkatan layanan KB pasca persalinan	Evaluasi reguler capaian program Bangsa Kencana	Optimalisasi penyuluhan berbasis media digital	Sertifikasi & insentif kader keluarga berkualitas

3.2 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025- 2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan agar selaras dengan strategi dan kebijakan daerah rencana program prioritas tahun 2025-2029.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi daerah. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir, strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029, disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Pelayanan KB yang merata dan berkualitas	Peningkatan akses dan kualitas layanan KB	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB modern	
2	Penguatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R)	Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan	
3	Pendataan keluarga dan pemanfaatan SIGA	Penguatan basis data penduduk dan keluarga	Optimalisasi pendataan keluarga dan pemanfaatan SIGA berbasis NIK	
4	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKA	Peningkatan pemberdayaan keluarga berbasis ekonomi	Meningkatkan jumlah dan kapasitas kelompok UPPKA aktif	
5	Advokasi dan KIE pengendalian penduduk	Edukasi dan literasi penduduk	Meningkatkan KIE perubahan perilaku terkait kependudukan	

Tabel. 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Rancangan Renstra PD							
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<p>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif</p> <p>Sasaran : Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Inklusif</p>	Memperkuat Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas dalam berbagai Aspek Pembangunan	Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Program Penguatan Ketahanan Keluarga	Penguatan Kapasitas Kader dan Fasilitator Ketahanan Keluarga serta PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	Revitalisasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR), Balita (BKB), dan Lansia (BKL) berbasis Gender & Inklusi	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Disabilitas dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga	Penguatan Edukasi Kespro (Kesehatan Reproduksi) Remaja dan Perempuan melalui Kolaborasi Lintas Sektor	Evaluasi dan Penguatan Kebijakan Inklusif Berbasis Gender dan Pendekatan Keluarga di Tingkat Daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Dalam Mencapai Kinerja PD

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilansasaran dan tujuan. Melalui penetapan program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dapat ditindak lanjuti dan diselesaikan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang beris satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.871.995.500,00		7.919.899.425,00		7.969.000.948,00		7.989.132.573,00		7.999.299.043,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.087.194.500,00		3.137.249.525,00		3.186.351.048,00		3.206.482.673,00		3.216.649.143,00	
Meningkatnya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.087.194.500,00	100	3.137.249.525,00	100	3.186.351.048,00	100	3.206.482.673,00	100	3.216.649.143,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					359.222.000,00		359.222.000,00		359.222.000,00		359.222.000,00		359.222.000,00	
Meningkatnya Kesadaran Penduduk Terhadap Usia Ideal Perkawinan	Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) pada Kelompok Umur 25-49 Tahun (Tahun)	100	100	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.211.159.000,00		2.211.159.000,00		2.211.159.000,00		2.211.159.000,00		2.211.159.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Metode Kontrasepsi Modern	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	68,61	55,90	57,40	2.211.159.000,00	58,90	2.211.159.000,00	60,40	2.211.159.000,00	61,90	2.211.159.000,00	63,40	2.211.159.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.214.420.000,00		2.212.268.900,00		2.212.268.900,00		2.212.268.900,00		2.212.268.900,00	
Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 -19 Tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) (Nilai)	100	100	100	2.214.420.000,00	100	2.212.268.900,00	100	2.212.268.900,00	100	2.212.268.900,00	100	2.212.268.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					7871995500.00		7919899425.00		7969000948.00		7989132573.00		7999299043.00	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
- Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Inklusif	Terwujudnya Keluarga Sejahtera				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))		
		Menurunnya Angka Kelahiran Total			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)		
			Meningkatnya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.14.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah		2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.14.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kesadaran Penduduk Terhadap Usia Ideal Perkawinan		Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) pada Kelompok Umur 25-49 Tahun (Tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	
				Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten		2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
					Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Metode Kontrasepsi Modern		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK		2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
					Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesetaraan KB Pria	
					Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
					Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB		2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (Nilai)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
					Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Cakupan Kelompok Masyarakat Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	

TABEL 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.871.995.500,00		7.919.899.425,00		7.969.000.948,00		7.989.132.573,00		7.999.299.043,00		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.087.194.500,00		3.137.249.525,00		3.186.351.048,00		3.206.482.673,00		3.216.649.143,00		
Meningkatnya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	3.087.194.500,00	100	3.137.249.525,00	100	3.186.351.048,00	100	3.206.482.673,00	100	3.216.649.143,00	2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - DPPKB	
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		6.151.100,00		6.151.100,00		6.151.100,00		6.151.100,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	0	0,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		1.151.100,00		1.151.100,00		1.151.100,00		1.151.100,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	0	0,00	1	1.151.100,00	1	1.151.100,00	1	1.151.100,00	1	1.151.100,00		
2.14.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	0	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.316.157.000,00		2.364.060.925,00		2.413.162.448,00		2.433.294.073,00		2.443.460.543,00		
Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.316.157.000,00		2.364.060.925,00		2.413.162.448,00		2.433.294.073,00		2.443.460.543,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	2.316.157.000,00	30	2.364.060.925,00	30	2.413.162.448,00	30	2.433.294.073,00	30	2.443.460.543,00		
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran														
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00		
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				366.037.500,00		362.037.500,00		362.037.500,00		362.037.500,00		362.037.500,00		
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.037.500,00		78.037.500,00		78.037.500,00		78.037.500,00		78.037.500,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	78.037.500,00	12	78.037.500,00	12	78.037.500,00	12	78.037.500,00	12	78.037.500,00		
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				288.000.000,00		284.000.000,00		284.000.000,00		284.000.000,00		284.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	288.000.000,00	12	284.000.000,00	12	284.000.000,00	12	284.000.000,00	12	284.000.000,00		
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
2.14.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00		
2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				840.000,00		840.000,00		840.000,00		840.000,00		840.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	840.000,00	4	840.000,00	4	840.000,00	4	840.000,00	4	840.000,00		
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				69.160.000,00		69.160.000,00		69.160.000,00		69.160.000,00		69.160.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	69.160.000,00	1	69.160.000,00	1	69.160.000,00	1	69.160.000,00	1	69.160.000,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				359.222.000,00		359.222.000,00		359.222.000,00		359.222.000,00		359.222.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Penduduk Terhadap Usia Ideal Perkawinan	Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) pada Kelompok Umur 25-49 Tahun (Tahun)	100	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	100	359.222.000,00	2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - DPPKB	
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				61.576.100,00		61.576.100,00		61.576.100,00		61.576.100,00		61.576.100,00		
Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	0	1	61.576.100,00	1	61.576.100,00	1	61.576.100,00	1	61.576.100,00	1	61.576.100,00		
2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				30.525.000,00		30.525.000,00		30.525.000,00		30.525.000,00		30.525.000,00		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	1	30.525.000,00	1	30.525.000,00	1	30.525.000,00	1	30.525.000,00	1	30.525.000,00		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				19.051.100,00		19.051.100,00		19.051.100,00		19.051.100,00		19.051.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	0	11	19.051.100,00	11	19.051.100,00	11	19.051.100,00	11	19.051.100,00	11	19.051.100,00		
2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				297.645.900,00		297.645.900,00		297.645.900,00		297.645.900,00		297.645.900,00		
Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)													
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				62.022.000,00		62.022.000,00		62.022.000,00		62.022.000,00		62.022.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0	1	62.022.000,00	1	62.022.000,00	1	62.022.000,00	1	62.022.000,00	1	62.022.000,00		
2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1.500.000,00		1.500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				6.385.700,00		6.385.700,00		6.385.700,00		6.385.700,00		6.385.700,00		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	6.385.700,00	1	6.385.700,00	1	6.385.700,00	1	6.385.700,00	1	6.385.700,00		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				65.200.000,00		65.200.000,00		65.200.000,00		65.200.000,00		65.200.000,00		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	11	65.200.000,00	11	65.200.000,00	11	65.200.000,00	11	65.200.000,00	11	65.200.000,00		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota				5.870.000,00		5.870.000,00		5.870.000,00		5.870.000,00		5.870.000,00		
Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	0	1	5.870.000,00	1	5.870.000,00	1	5.870.000,00	1	5.870.000,00	1	5.870.000,00		
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				14.100.000,00		14.100.000,00		14.100.000,00		14.100.000,00		14.100.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	0	11	14.100.000,00	11	14.100.000,00	11	14.100.000,00	11	14.100.000,00	11	14.100.000,00		
2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB				500.000,00		500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	0	106	500.000,00	106	500.000,00	106	500.000,00	106	500.000,00	106	500.000,00		
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				965.200,00		965.200,00		965.200,00		965.200,00		965.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	0	1	965.200,00	1	965.200,00	1	965.200,00	1	965.200,00	1	965.200,00		
2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				7.103.000,00		7.103.000,00		7.103.000,00		7.103.000,00		7.103.000,00		
Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	1	1	7.103.000,00	1	7.103.000,00	1	7.103.000,00	1	7.103.000,00	1	7.103.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.211.159.000,00		2.211.159.000,00		2.211.159.000,00		2.211.159.000,00		2.211.159.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Metode Kontrasepsi Modern	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	68,61	57,40	2.211.159.000,00	58,90	2.211.159.000,00	60,40	2.211.159.000,00	61,90	2.211.159.000,00	63,40	2.211.159.000,00	2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - DPPKB	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				900.725.000,00		900.725.000,00		900.725.000,00		900.725.000,00		900.725.000,00		
Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1	11	900.725.000,00	11	900.725.000,00	11	900.725.000,00	11	900.725.000,00	11	900.725.000,00		
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				537.900.000,00		537.900.000,00		537.900.000,00		537.900.000,00		537.900.000,00		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	11	537.900.000,00	11	537.900.000,00	11	537.900.000,00	11	537.900.000,00	11	537.900.000,00		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	0	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00	11	132.000.000,00		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				129.000.000,00		129.000.000,00		129.000.000,00		129.000.000,00		129.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	129.000.000,00	1	129.000.000,00	1	129.000.000,00	1	129.000.000,00	1	129.000.000,00		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				99.950.000,00		99.950.000,00		99.950.000,00		99.950.000,00		99.950.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1	11	99.950.000,00	11	99.950.000,00	11	99.950.000,00	11	99.950.000,00	11	99.950.000,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				267.250.000,00		267.250.000,00		267.250.000,00		267.250.000,00		267.250.000,00		
Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK				267.250.000,00	1	267.250.000,00	1	267.250.000,00	1	267.250.000,00	1	267.250.000,00		
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				265.375.000,00		265.375.000,00		265.375.000,00		265.375.000,00		265.375.000,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	106	106	265.375.000,00	106	265.375.000,00	106	265.375.000,00	106	265.375.000,00	106	265.375.000,00		
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				550.934.000,00		550.934.000,00		550.934.000,00		550.934.000,00		550.934.000,00		
Cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		0	1	550.934.000,00	1	550.934.000,00	1	550.934.000,00	1	550.934.000,00	1	550.934.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				17.100.000,00		17.100.000,00		17.100.000,00		17.100.000,00		17.100.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	12	17.100.000,00	12	17.100.000,00	12	17.100.000,00	12	17.100.000,00	12	17.100.000,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				505.534.000,00		505.534.000,00		505.534.000,00		505.534.000,00		505.534.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	45	1.329	505.534.000,00	1.329	505.534.000,00	1.329	505.534.000,00	1.329	505.534.000,00	1.329	505.534.000,00		
2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				22.050.000,00		22.050.000,00		22.050.000,00		22.050.000,00		22.050.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	6	22.050.000,00	6	22.050.000,00	6	22.050.000,00	6	22.050.000,00	6	22.050.000,00		
2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	0	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				492.250.000,00		492.250.000,00		492.250.000,00		492.250.000,00		492.250.000,00		
Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB		1	1	492.250.000,00	1	492.250.000,00	1	492.250.000,00	1	492.250.000,00	1	492.250.000,00		
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				346.500.000,00		346.500.000,00		346.500.000,00		346.500.000,00		346.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	50	63	346.500.000,00	63	346.500.000,00	63	346.500.000,00	63	346.500.000,00	63	346.500.000,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				145.125.000,00		145.125.000,00		145.125.000,00		145.125.000,00		145.125.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	50	25	145.125.000,00	25	145.125.000,00	25	145.125.000,00	25	145.125.000,00	25	145.125.000,00		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00	1	625.000,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.214.420.000,00		2.212.268.900,00		2.212.268.900,00		2.212.268.900,00		2.212.268.900,00		
Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (Nilai)	100	100	2.214.420.000,00	100	2.212.268.900,00	100	2.212.268.900,00	100	2.212.268.900,00	100	2.212.268.900,00	2.14.00.00.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				581.720.000,00		579.568.900,00		579.568.900,00		579.568.900,00		579.568.900,00		
Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				581.720.000,00		579.568.900,00		579.568.900,00		579.568.900,00		579.568.900,00		
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00		
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL				2.162.500,00		2.162.500,00		2.162.500,00		2.162.500,00		2.162.500,00		
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	0	6	2.162.500,00	7	2.162.500,00	8	2.162.500,00	10	2.162.500,00	11	2.162.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				86.220.000,00		86.220.000,00		86.220.000,00		86.220.000,00		86.220.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	11	86.220.000,00	11	86.220.000,00	11	86.220.000,00	11	86.220.000,00	11	86.220.000,00		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				318.000.000,00		318.000.000,00		318.000.000,00		318.000.000,00		318.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	0	106	318.000.000,00	106	318.000.000,00	106	318.000.000,00	106	318.000.000,00	106	318.000.000,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	0	10	3.000.000,00	15	3.000.000,00	20	3.000.000,00	25	3.000.000,00	30	3.000.000,00		
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				3.500.000,00		1.348.900,00		1.348.900,00		1.348.900,00		1.348.900,00		
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	400	3.500.000,00	450	1.348.900,00	465	1.348.900,00	500	1.348.900,00	530	1.348.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	0	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	0	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0	6	1.000.000,00	7	1.000.000,00	8	1.000.000,00	10	1.000.000,00	11	1.000.000,00		
2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				30.837.500,00		30.837.500,00		30.837.500,00		30.837.500,00		30.837.500,00		
Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	0	11	30.837.500,00	11	30.837.500,00	11	30.837.500,00	11	30.837.500,00	11	30.837.500,00		
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0	373	1.000.000,00	373	1.000.000,00	373	1.000.000,00	373	1.000.000,00	373	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	0	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0	400	1.000.000,00	450	1.000.000,00	465	1.000.000,00	500	1.000.000,00	530	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.632.700.000,00		1.632.700.000,00		1.632.700.000,00		1.632.700.000,00		1.632.700.000,00		
Cakupan Kelompok Kemasyarakatan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				741.000.000,00		741.000.000,00		741.000.000,00		741.000.000,00		741.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	11	741	741.000.000,00	741	741.000.000,00	741	741.000.000,00	741	741.000.000,00	741	741.000.000,00		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				889.200.000,00		889.200.000,00		889.200.000,00		889.200.000,00		889.200.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	11	741	889.200.000,00	741	889.200.000,00	741	889.200.000,00	741	889.200.000,00	741	889.200.000,00		
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

TABEL 4.3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Awal
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,07	2,07	2,07	2,08	2,09	2,10	2,10	
2	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	68,61	69,88	70,76	71,45	71,25	72,63	71,85	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Indeks	60,04	61,04	62,04	63,04	64,04	65,04	65,04	
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	85	56	60	65	70	85	85	
5	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85	86	87	88	89	90	90	
6	Kelompok Sasaran Mendapatkan Pendampingan	Kelompok	247	247	247	247	247	247	247	
7	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	37	32	25	20	20	18	18	
8	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting	%	79,86	97,35	98,18	98,67	99,00	99,33	100	
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	35	35	40	45	50	65	65	
10	Rasio Akseptor KB	%	68,98	73,39	72,92	73,83	72,71	74,84	73,59	
11	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	78,2	78	80	82	84	85	85	
12	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	%	42,46	45	50	55	60	65	70	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68,61	55,90	57,40	58,90	60,40	61,90	63,40	
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	Nilai	2,07	2,07	2,07	2,08	2,09	2,10	2,10	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,90	12,5	11	10	8,5	7	6	

4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut adalah Program Prioritas Pendukung Pembangunan Daerah yang relevan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) dalam periode 2025–2029, sesuai dengan peran dan fungsinya:

TABEL 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Musrebang Renstra Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatkan Pemanfaatan Alat dan Metode Kontrasepsi Modern	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
2			Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
4			Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

4.3 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Penetapan Indikator kinerja Utama Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dapat disajikan pada table berikut ini :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA MUSREMBANG
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	60,04	61,04	62,04	63,04	64,04	65,04	66,04	
3.	Nilai Sakip	poin	55,70	58,20	61,40	64,16	66,21	68,04	70,16	
4.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata- rata Anak per Wanita	2,07	2,07	2,07	2,08	2,09	2,10	2,10	

4.4 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif.

Selanjutnya Indikator kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025-2029 disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	positif	%	68,61	55,90	57,40	58,90	60,40	61,90	63,40	
3.	Angka Kelahiran Total (TFR)	positif	Nilai	2,07	2,07	2,07	2,08	2,09	2,10	2,10	
4.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	7,90	12,5	11	10	8,5	7	6	

BAB V

PENUTUP

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kedepan. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang memuat tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini Kabupaten Sidenreng Rappang maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bergantung pada komitmen jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada serta sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



SYAHRUL MUBARAK, SKM, M.Amd.KP

Nip. 19810802 200604 1 015